



HUBUNGAN SOSIALISASI POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK TENTANG PEMILU SERENTAK 2018 DI PARIAMAN

Megawati Aliya Octaputri^{1(a)}, M. Fachri Adnan^{2(b)}

¹*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

²*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

^{a)}*megawatialiyaoctaptr@gmail.com, ^{b)}fachriadnan@fis.unp.ac.id*

ABSTRACT – *The purposes of this research is to explains correlation between political socialization and citizen's political participation on Pariaman Election on 2018. This research using quantitative descriptive method. Data were collected by questionarre. The population consists of all 59.245 voters using Proportionate Random Sampling. Respondents are counted by using Slovin with margin of error 5% and the result are 397 repondents. The result finding shows that there's low correlation between political socialization with political participatin on Pariaman Election on 2018.*

Keywords : *Political Participation, Political Socialization*

Corresponding author. Email. *megawatialiyaoctaptr@gmail.com, fachriadnan@fis.unp.ac.id*

How to cite this article. Octaputri, M. Aliya & Adnan, M. Fachri. (2019). Hubungan Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik tentang Pemilu Serentak 2018 di Pariaman. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 1 (4), Hal. 39-48.

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print)

Copyright©2019. Published by Pusat Kajian-Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat (PK-P2M) FIS UNP Padang

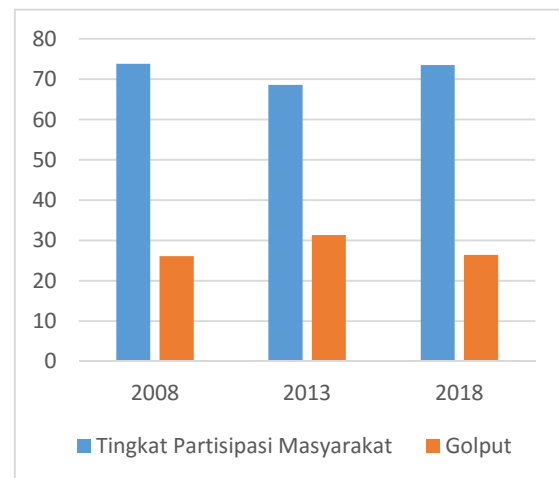
PENDAHULUAN

Partisipasi politik sangat penting dalam mewujudkan kehidupan negara yang demokratis. Salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi ditandai dengan tingkat keaktifan masyarakat pada aktivitas politik seperti keaktifan pada pemilihan kepala daerah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah diperlukan sosialisasi politik. Dengan adanya sosialisasi politik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah di Kota Pariaman telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di Sumatera Barat tahun 2018. Pada waktu itu terdapat tiga pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yaitu, pasangan Mahyuddin & Muhammad Ridwan nomor urut satu yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Sedangkan pasangan Dewi Fitri Deswati & Pabrisal nomor urut dua diusung oleh Partai NasDem dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan Genius Umar & Mardison Mahyuddin nomor urut tiga diusung oleh PDIP, Partai Golkar, PPP, PBB dan PAN.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Pariaman tahun 2018 masih rendah dibandingkan dengan target nasional. Target nasional partisipasi masyarakat dalam Pemilihan kepala daerah serentak yaitu 77,5%, sedangkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Pariaman hanya mencapai 73,55%. Disamping itu jumlah angka golput masih tinggi mencapai 26,45%, sedangkan suara tidak sah yang mencapai 442 suara atau 0,9% dari daftar pemilih tetap.

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Golput pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pariaman



Disamping itu tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat pada umumnya masih rendah. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padang partisipasi masyarakat hanya mencapai 64,5%. Sebelumnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 di Kota Padang juga mengalami partisipasi yang rendah yaitu hanya 57,71% pada putaran pertama dan 53,6% pada putaran kedua. Jika dilihat dari nilai perentase partisipasi pada pemilihan kepala daerah di Kota Padang memang mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2018, namun angka tersebut masih sangat jauh dari target partisipasi nasional. Sementara dua daerah lainnya di Sumatera Barat yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 juga memiliki persentase partisipasi yang dibawah angka target nasional. Pada pemilihan kepala daerah di Kota Sawahlunto partisipasi pemilih mencapai 77,37%. Sementara partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah di Kota Padang Panjang hanya mencapai 71,3%.

Sama halnya dengan partisipasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 di Sumatera Barat, jumlah partisipasi pemilih juga rendah yaitu hanya sebesar 52,06%. Melihat angka partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat tersebut, memberikan

gambaran bahwa rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan suara pada pemilihan umum. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut diperlukan peran dari berbagai pihak dengan mekanisme tertentu untuk melakukan sosialisasi politik.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Hendrik (2010) mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2008 menunjukan bahwa secara kuantitatif penyebab rendahnya partisipasi politik adalah kurangnya sosialisasi politik serta lemahnya kesadaran politik masyarakat. Namun secara kualitatif ditemukan bahwa penyebab rendahnya partisipasi politik adalah karena masih adanya masyarakat yang tidak disosialisasikan, tidak terdaftar dalam DPT serta adanya masyarakat tidak mau peduli dengan Pilkada. Penelitian ini menunjukan bahwa secara umum masalah rendahnya partisipasi diakibatkan oleh rendahnya sosialisasi politik.

Mekanisme sosialisasi politik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara demi meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Zeparianto dan Adnan (2019) yang mengemukakan bahwa sosialisasi dapat dilakukan dengan pemanfaatan media melalui aplikasi Sipadli yang dapat digunakan di *handphone* untuk penyebaran informasi mengenai Pilkada Kota Padang tahun 2018. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh umumnya masyarakat Kota Padang memanfaatkan media internet yang diakses melalui *handphone* untuk menari informasi. Dengan adanya aplikasi tersebut sarannya adalah tercapainya kemudahan akses serta penyebarluasan informasi mengenai Pilkada Kota Padang ke seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Adnan (2019) yang meneliti tentang pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pilkada

Kota Padang tahun 2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi komisi pemilihan umum berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula. Dari beberapa penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa sosialisasi politik berhubungan dengan partisipasi politik.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas penelitian ini bermaksud ingin mengkaji hubungan sosialisasi politik dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Pariaman tahun 2018. Adapun permasalahan penelitiannya adalah *“Apakah terdapat hubungan antara sosialisasi politik dengan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Pariaman tahun 2018?”*

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Politik

Partisipasi secara etimologis berasal dari *pars* yang artinya bagian dan *sipasi* yang artinya mengambil (Sahid, 2015). Sehingga bila kedua kata tersebut digabungkan maka dapat berarti “mengambil bagian”. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (Nelson, 1994) mendefinisikan partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Sedangkan Herbert McClosky (Budiarjo, 2012) mengartikan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Kemudian Damsar (2012) mengatakan bahwa partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan (*power*), otoritas (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi (*conflict and resolution*), kebijakan

(*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), distribusi (*distribution*) ataupun alokasi (*allocation*). Dari banyaknya definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Proses politik yang dimaksud dapat berupa kontrol terhadap kebijakan, kinerja pemerintah, ikut serta dalam kompetisi kekuasaan dan dapat juga dalam pemberian hak suara. Keikutsertaan masyarakat dianggap penting terutama dalam perwujudan kesejahteraan daerah yang memerlukan sinergitas antara visi pemerintah dan kerja sama masyarakat.

Partisipasi politik mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah, menurut Sahid (2015) fungsi partisipasi antara lain; (a) untuk mendorong program – program pemerintah, (b) sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan dan (c) sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan. Partisipasi politik dapat bermanfaat bagi individu, kelompok maupun pemerintah baik dalam bidang ekonomi, sosial, psikologis dan lain sebagainya. Jadi apabila partisipasi politik masyarakat dalam suatu daerah dikatakan baik maka akan berpengaruh bagi kehidupan politik, sosial dan ekonomi daerah tersebut.

Partisipasi politik dapat diklasifikasikan kedalam berbagai bentuk. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994) diidentifikasi bentuk – bentuk partisipasi dalam kegiatan pemilihan yaitu sebagai berikut.

1) *Kegiatan pemilihan* mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan – sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau

setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

- 2) *Lobbying* mencakup upaya – upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintah dan pemimpin – pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan mereka mengenai persoalan – persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- 3) *Kegiatan organisasi* menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Menjadi anggota organisasi yang demikian itu, pada dirinya sendiri, sudah merupakan satu bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya organisasi itu untuk mempengaruhi pemerintah.
- 4) *Mencari koneksi (contacting)* merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- 5) *Tindak kekerasan (violence)* juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai suatu kategori tersendiri; artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang – orang atau harta benda.

Partisipasi politik ini dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Weimar (Sahid, 2015) terdapat lima faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yakni sebagai berikut:

- 1) Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi.

- 2) Terjadinya perubahan struktur kelas esensial. Semakin berkembangnya industrialisasi berpengaruh pada munculnya kelas baru seperti kelas menengah atau pekerja baru yang tentu memiliki kebutuhan atau tuntutan baru yang semakin meluas dan pada akhirnya mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- 3) Pengaruh meningkatnya kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa, ide – ide nasionalisme, liberalisme, dan ide lainnya yang menuntut partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 4) Adanya konflik di antara pemimpin – pemimpin politik. Pemimpin – pemimpin politik saling berkompetisi dalam merebut kekuasaan sehingga adanya mobilisasi partisipasi politik.
- 5) Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah konsep yang sangat terkait dengan partisipasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2011) sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat, persepsi mengenai politik serta reaksi – reaksinya terhadap gejala – gejala politik. Selanjutnya Rush dan Althoff juga menyatakan bahwa jika dilihat dari satu segi pandangan politik tertentu, sosialisasi politik adalah sangat penting sebagai proses, dengan mana individu individu sampai kepada kadar yang berbeda, bisa terlibat dalam satu sistem politik yaitu dalam partisipasi politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan individu dalam persepsi politiknya dan menciptakan tingkah laku politik yang lebih baik. Sosialisasi politik dilakukan oleh pihak yang disebut informan (subjek) yang kemudian disebut dengan agen sosialisasi politik.

Menurut Damsar (2012) terdapat berbagai mekanisme proses sosialisasi politik yakni; imitasi, instruksi, desiminasi, motivasi dan penataran. Proses transmisi nilai – nilai, pengetahuan, kepercayaan – kepercayaan, sikap politik dan harapan politik kepada individu atau kelompok menurutnya dapat dilakukan melalui cara tersebut, antara lain:

a) Imitasi

Imitasi dalam bentuk sosialisasi dimaknai sebagai proses peniruan. Melalui peniruan dari satu pihak ke pihak lain dapat mengubah kepercayaan, pandangan ataupun keputusan politik menjadi sama ataupun sedikit berbeda dari pihak yang ditirunya. Pihak yang melakukan peniruan tidak terbatas pada usia, etnik ataupun gender. Anak – anak dapat meniru orang yang lebih dewasa, bahkan sesama dewasa dapat juga melakukan peniruan. Peniruan terdiri dari dua macam yakni; peniruan pasif dan kreatif. Peniruan pasif artinya meniru secara keseluruhan sedangkan peniruan kreatif merupakan peniruan dengan menambah atau mengubah sedikit objek yang ditiru sehingga tidak dapat dikatakan sama. Jadi imitasi dalam hal ini adalah suatu bentuk peniruan perilaku dari satu pihak kepada pihak yang ditiru sehingga pihak yang meniru melakukan hal yang serupa dengan yang ditiru ataupun sedikit berbeda.

b) Instruksi

Instruksi selalu dimaknai sebagai perintah dari pihak yang berkuasa (ordinat) kepada pihak yang di bawahnya (subordinat). Dalam konteks sosialisasi politik, pemegang kekuasaan seperti negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki *power* untuk melakukan instruksi politik. Tidak hanya itu, organisasi politik seperti partai politik juga memiliki kekuasaan untuk memberi perintah politik kepada setiap anggotanya agar keputusan politik yang diambil pihak sub ordinat mengikuti pihak ordinat.

c) Desiminasi

Desiminasi artinya adalah aktivitas penyebarluasan informasi politik. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh aparat birokrasi atau para anggota legislatif dalam rangka penyebarluasan informasi politik, misalnya seperti pemberitahuan akan adanya agenda politik di suatu daerah. Sasaran dari desiminasi ini adalah individu maupun kelompok masyarakat yang belum mengetahui atau memahami informasi politik.

d) Motivasi

Motivasi sering kali dimaknai sebagai dorongan yang bertujuan agar objek yang diberi motivasi dapat berubah ke dari kondisi yang sebelumnya ke kondisi yang berbeda. Motivasi politik merupakan salah satu mekanisme politik untuk membentuk suatu sikap, perilaku seseorang atau kelompok tentang nilai – nilai, kepercayaan, sikap politik dan harapan politik tertentu. Motivasi ini dilakukan oleh agen sosialisasi yang dianggap memiliki kepercayaan tertentu dari pihak yang diberi motivasi.

Hubungan Sosialisasi dan Partisipasi Politik

Sosialisasi politik sebagaimana yang telah disepakati berarti bahwa sebuah proses pengenalan sistem politik kepada individu sehingga dapat mengubah persepsi individu dan sikap politiknya. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan; juga mempelajari sikap – sikap politik serta penilaiannya terhadap politik. Hasil dari pemeriksaan dan penilaian tersebut kemudian menghasilkan sebuah cara agar proses pengenalan tersebut bisa sampai dan diterima oleh objek yang bersangkutan.

Michael Rush dan Phillip Althoff (2011) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi – persepinya

mengenai politik serta reaksi – reaksinya terhadap gejala politik. Sosialisasi politik berhubungan dengan proses transmisi nilai sehingga dapat menambah ilmu dan persepsi serta juga dapat mempengaruhi keputusan politik individu. Melalui proses sosialisasi ini pula nantinya akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan politik bangsa.

Sementara Herbert McClosky (Budiarjo, 2012) mengartikan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Terdapat berbagai macam keterlibatan politik seperti aktif memberikan suara pada pemilihan umum, mengemukakan pendapat dalam pembuatan kebijakan, mengikuti kampanye, demonstrasi dan lain sebagainya. Aktivitas politik tersebut akan dapat dilakukan jika mereka mengenal sistem politik yang mereka anut. Maka dari itu diperlukan sosialisasi politik untuk semua pihak, terutama masyarakat sebagai pemilik kedaulatan di sistem demokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif model *explanatory research* atau penelitian penjelasan. Dengan maksud mengkaji hubungan sosialisasi politik dengan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Kota Pariaman. Populasi penelitian adalah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kota Pariaman tahun 2018 yaitu sebanyak 54.245 pemilih. Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi 5% sehingga diperoleh sampel sebanyak 397 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disusun dengan menggunakan skala likert yang telah diuji

validitas dan reliabilitasnya yaitu pada 30 responden diluar lokasi penelitian. Responden ditentukan dengan menggunakan teknik *Propotionate Random Sampling*, yaitu tersebar di empat Kecamatan di Kota Pariaman yakni, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Tengah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis *Pearson Product Moment* karena penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara dua variabel.

Untuk melihat sosialisasi yang diterima oleh masyarakat pada Pilkada Kota Pariaman diukur dengan menggunakan indikator mekanisme sosialisasi menurut Damsar (2012) yakni imitasi, instruksi, desiminasi dan motivasi. Sedangkan item pernyataan yang dikemukakan kepada responden terdiri dari 8 pernyataan seperti; (1) ikut memilih karena peniruan (2) ikut memilih karena ajakan (3) mendapatkan informasi Pilkada dari KPU (4) mendapatkan informasi tentang tata cara mencoblos dari KPU (5) mendapatkan informasi tentang Pilkada dari televisi (6)

mendapatkan informasi tentang Pilkada dari koran (7) mendapatkan informasi tentang Pilkada dari media sosial/internet dan (8) ikut memilih karena mendapat dorongan/motivasi. Sementara partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Pariaman diukur dengan indikator partisipasi pada kegiatan pemilihan umum menurut Samuel P. Hutington dan Joan M. Nelson (1994) yaitu (1) ikut menyebarkan pamflet/leaflet pasangan calon pada masa kampanye (2) ikut memasang spanduk pada masa kampanye (3) ikut memberikan sumbangan dana kampanye (4) ikut menghadiri acara kampanye dan (5) ikut mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan calon tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini dijelaskan hasil penelitian tentang hubungan sosialisasi politik dengan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kota Parimanan tahun 2018. Hasil uji statistik Korelasi *Pearson Product Moment* antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Uji Korelasi Pearson Product Moment (rxy)
Correlations**

		Sosialisasi Politik	Partisipasi Politik
Sosialisasi Politik	Pearson Correlation	1	.275**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	397	397
Partisipasi Politik	Pearson Correlation	.275**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	397	397

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil olahan data penelitian 2019

Berdasarkan pada hasil uji korelasi pada tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap partisipasi politik. Hal

ini dapat dilihat pada nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sosialisasi

politik dengan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala kota Pariaman tahun 2018. Untuk memperkuat kesimpulan tersebut dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, apabila r hitung $>$ r tabel maka hubungan tersebut signifikan. Pada tabel 1 diketahui bahwa r hitung adalah 0,275 sementara r tabel untuk N sebanyak 397 adalah 0,098. Nilai r hitung 0,275 lebih besar dari nilai r tabel 0,098. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik.

Selanjutnya untuk melihat derajat keeratan hubungan koefisien korelasi yakni dengan cara melihat nilai *Pearson Correlation* yaitu 0,275. Untuk memaknai nilai *Pearson Correlation* tersebut dapat menggunakan acuan interpretasi korelasi seperti berikut.

Tabel 2. Interpretasi Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,00	Sangat Kuat
0,60 – 1,79	Kuat
0,40 – 1,59	Cukup Kuat
0,20 – 1,39	Rendah
0,00 – 0,19	Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono (2016)

Mengacu pada tabel 2 interpretasi di atas dapat diketahui bahwa nilai 0,275 berada pada kategori tingkat hubungan yang “**Rendah**”. Kemudian rentang nilai koefisien korelasi selalu berkisar antara -1 , 0 dan 1 . Hal tersebut berarti apabila nilai semakin mendekati nilai 1 maka hubungan makin erat dan positif, sementara apabila nilainya adalah 0 maka tidak terdapat korelasi/hubungan, sedangkan apabila nilai mendekati -1 maka terdapat hubungan yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik hubungan yang positif dengan partisipasi politik.

7,56% sedangkan 92,44% sisanya dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan hubungan sosialisasi politik dengan partisipasi politik pada Pilkada Kota Pariaman tahun 2018. Hasil penelitian Syarif (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik dengan indikator sosialisasi yang diterima dari keluarga, *peer group* dan media massa. Bahwa artinya dengan adanya pengaruh sosialisasi terhadap peningkatan partisipasi melalui agen sosialisasi politik.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh determinan dalam presentase antara sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dalam penelitian ini, maka diuji dengan uji koefisien determinasi sebagai berikut.

$$D = (r_{xy})^2 \times 100\%$$

$$D = (0,275)^2 \times 100\%$$

$$D = 0,0756 \times 100\%$$

$$D = 7,56\%$$

Berarti hubungan sosialisasi politik dengan partisipasi politik adalah sebesar

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rina Fitri et. al. (2019) membahas kerjasama KPU dengan alim ulama agar alim ulama ikut dalam pelaksanaan sosialisasi pada Pilkada Kota Padang Panjang tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dari pemilihan kepala daerah sebelumnya hanya 67% pada tahun 2013 ke 71,3% pada tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik.

Sosialisasi dapat juga dilakukan melalui instruksi yang artinya adalah adanya perintah dari pihak yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini yang dimaksud dapat berarti perintah ataupun program dari pemerintah dalam rangka melaksanakan sosialisasi politik. Penelitian Heri Kusmanto (2013) tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa (*rural community*) menjelaskan bahwa oleh karena minimnya tingkat pendidikan serta rendahnya tingkat perekonomiannya masyarakat desa, mereka menganggap partisipasi politik adalah hal yang sia – sia. Maka perlu adanya peran dari Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan penyuluhan – penyuluhan, pendidikan politik sehingga masyarakat desa akan mengerti dan memahami bahwa partisipasi mereka dalam politik dapat menunjang pembangunan desa ke arah yang lebih baik.

Dilihat dari penjabaran di atas diketahui bahwa adanya hubungan sebab akibat sosialisasi terhadap partisipasi politik. Maka aspek sosialisasi harus menjadi perhatian pihak terkait. Dengan adanya peningkatan nilai pada aspek sosialisasi maka akan berpengaruh pada peningkatan partisipasi politik masyarakat. Oleh karena adanya penguatan bukti hubungan kausalitas serta pembuktian dengan uji korelasi antara sosialisasi dengan partisipasi politik maka dinyatakan bahwa terdapat hubungan sosialisasi politik dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Pariaman tahun 2018.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik berhubungan positif dengan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kota Pariaman tahun 2018. Kemudian pengaruh determinasi sosialisasi politik terhadap partisipasi politik sebesar 7,56% sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya. Meskipun hubungan antara

sosialisasi politik dengan partisipasi politik rendah/lemah namun peningkatan sosialisasi masih sangat perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dibutuhkan peran dari berbagai pihak seperti dari agen sosialisasi politik untuk meningkatkan atau menggencarkan sosialisasi terutama kepada daerah yang terindikasi memiliki persentase partisipasi memilih yang rendah pada pemilihan kepala daerah.

Sekalipun sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang bersikap apolitis atau tidak ingin berpartisipasi. Meskipun sikap apolitis bukan merupakan hal yang negatif, karena bisa saja sikap tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Namun pada akhirnya lembaga demokrasi tetap membutuhkan peran dari rakyat baik itu dalam bentuk kritikan, tuntutan, kepercayaan, dukungan dan kepedulian. Peran dari masyarakat ini sangat dibutuhkan demi melanggengkan pemerintahan yang berasal dari rakyat, ditentukan oleh rakyat dan kemudian dimanfaatkan kembali untuk rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Althoff, M. R. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, P. M. (2012). *Dasar - dasar Ilmu Politik*. Jakarta: CV. Prisma Grafika.
- Damsar, P. D. (2012). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hendrik, D. (2010). Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2008. *DEMOKRASI* Vol. IX No. 2, 137.

- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 1 (1), 39.
- Nelson, S. P. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fitri, Rina., Adnan, M. F., & Syamsir. (2019). Peranan Kepemimpinan Alim Ulama dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada di Kota Padang Panjang. *Ranah Research*, 280-285.
- Sahid, K. (2015). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: CV Prima Grafika.
- Syarif, M. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Walikota 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. *e-Journal Pemerintahan Integratif Vol. 4 No. 4*, 548. Dipetik November 23, 2018.
- Wahyudi, M. I. & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kota Padang tahun 2018. *Jurnal Perspektif*, 159.
- Zefarianto, D. & Adnan, M. F. (2019). Efektivitas Aplikasi Sipadlih pada Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. *Jurnal PERSPEKTIF*, 157.
- Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – undang No. 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.